



HARGA BERAS LIAR KEBIJAKAN PEMERINTAH APA KABAR?

Harga beras cetak rekor, mencapai titik tertinggi selama lima tahun. Hal itu tampak dari data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok Kementerian Perdagangan, rata-rata nasional. Tercatat harga beras medium mencapai Rp 11.800 per kg pada Rabu (15/3/2023). Sementara rata-rata nasional harga beras premium mencapai Rp 13.700 per kg. Bahkan kondisi 'perberasan' diperkirakan akan makin bergerak liar. Sebab pemerintah bukannya berusaha menekan harga, tapi malah memilih menaikkan harga eceran tertinggi (HET) beras dan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah petani. Alasannya, untuk menjaga kesejahteraan petani. Langkah ini dinilai malah akan memicu masalah baru, yaitu adanya pasar gelap dan meningkatkan risiko kelangkaan beras. Bisa ditebak ujung-ujungnya impor akan dijadikan jurus pamungkas. Bahkan pemerintah melalui Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan secara terang-terangan sudah membuka opsi impor beras 500 ribu ton lagi. Komitmen swasembada pun makin jauh panggang dari api.

(Baca Hal 11)

KENAIKAN HET BERAS BERDASARKAN BEBERAPA ZONASI DI TANAH AIR VERSI BAPANAS

- **ZONA I** yang mencakup seluruh Pulau Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, NTB dan Sulawesi HET menjadi Rp 10.900 per kilogram untuk beras medium dan Rp 13.900 untuk beras premium.
- **ZONA II** mulai dari Pulau Sumatera selain Lampung dan Sumatera Selatan, NTT, dan Kalimantan, HET menjadi Rp 11.500 per kilogram untuk beras medium dan Rp 14.400 untuk beras premium.
- **ZONA III** yang mencakup Maluku dan Papua HET beras berada di Rp 11.800 per kilogram untuk beras medium dan Rp 14.800 untuk beras premium.

HPP GABAH

- HPP untuk gabah kering panen (GKP) di tingkat petan **RP 5.000 PER KG**
- HPP GKP di tingkat penggilingan sebesar **RP 5.100 PER KG**
- Gabah kering giling (GKG) di tingkat penggilingan **RP 6.200 PER KG**
- Gabah kering giling (GKG) di tingkat penggilingan **RP 6.200 PER KG**
- GKG di Gudang Perum Bulog sebesar **RP 6.300 PER KG**
- HPP beras untuk gudang Perum Bulog menjadi **RP 9.950 PER KG**

(derajat SOSO 95%, kadar air 14%, butir patah maksimum 20%, dan butir menir maksimum 2%.)

Government (Hal.2)
Kejagung Temukan
Manipulasi Proyek BTS,
Bakal Gelar Perkara
Tentukan Status
Menkominfo

Kejagung Temukan Manipulasi Proyek BTS, Bakal Gelar Perkara Tentukan Status Menkominfo



Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate telah diperiksa kedua kalinya, Rabu (15/3/2023) kurang lebih enam jam sejak pukul 09.00 WIB sampai 15.00 WIB.

JAKARTA - Kejaksanaan Agung (Kejagung) menemukan manipulasi laporan pembangunan proyek base transceiver station (BTS) 4G Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Hal itu diketahui usai tim dari Kejagung pengecekan langsung ke lokasi berdirinya infrastruktur telekomunikasi tersebut.

"Beberapa saat lalu, kami telah mengirim tim ke beberapa wilayah untuk cek ke lokasi, dan hasilnya sebagian besar tidak sesuai yang dilaporkan secara resmi pada kami," ujar Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Dirdik Jampidsus) Kejaksanaan Agung, Kuntadi, di Jakarta, Rabu (15/3/2023).

Lebih rinci, Kuntadi memaparkan ketidakcocokan jumlah pembangunan BTS 4G itu ditemukan di Nusa Tenggara Timur, Sulawesi, Maluku, Papua, dan wilayah lainnya.

Terkait persentase perkembangan pembangunan BTS 4G tersebut, Kuntadi menyebutkan bahwa Kejagung tengah menghitungnya dengan dibantu ahli dan BPKP.

"Terkait dengan penghitungan kerugian negara, sampai saat ini masih proses penghitungan," ucapnya.

Kejagung terus menelusuri dugaan kasus dugaan korupsi dalam penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kominfo Tahun 2020-2022.

Saksi-saksi dari swasta dan pemerintah terus dipanggil untuk membantu Kejagung menemukan titik terang tentang proyek infrastruktur telekomunikasi tersebut, termasuk

pemanggilan terhadap Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate.

Johnny telah diperiksa kedua kalinya, Rabu (15/3/2023) kurang lebih enam jam sejak pukul 09.00 WIB sampai 15.00 WIB. Sebanyak 26 pertanyaan ditanyakan penyidik Kejagung kepada Johnny.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Dirdik Jampidsus) Kejaksanaan Agung, Kuntadi, mengungkapkan pihaknya akan melakukan gelar perkara dugaan korupsi dalam penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kominfo Tahun 2020-2022.

"Hasil pemeriksaan saat ini saya nilai sudah cukup dan selanjutnya, kami akan melakukan gelar perkara," ujar Kuntadi di Gedung Bundar Jampidsus Kejagung, Jakarta Selatan, Rabu (15/2023).

Gelar perkara tersebut, Kuntadi melanjutkan, akan menentukan pula status Menkominfo Johnny G. Plate. Diketahui dalam dua kali pemanggilan oleh Kejagung terhadap Johnny ini berstatus sebagai saksi.

"Untuk gelar perkara tentunya, untuk perkara keseluruhan, tapi sekaligus di dalamnya termasuk juga terkait dengan posisi JP," ucapnya.

Adapun, pada hari ini, selain pemeriksaan Menkominfo Johnny G. Plate, Kejagung juga memeriksa enam saksi lainnya, tiga orang dari Bakti Kominfo dan tiga orang lainnya dari pihak swasta.

Mengenai gelar perkara dugaan korupsi dalam penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kominfo Tahun 2020-2022, Kepala

Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Ketut Sumedana, mengungkapkan waktunya.

"Mudah-mudahan dalam waktu minggu ke depan ada jawaban, teman-teman bisa kumpul lagi ke sini," kata Ketut.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, Johnny mendapatkan panggilan untuk kedua kalinya oleh Kejagung. Panggilan pertama pada tanggal 14 Februari dan yang kedua hari ini.

Tujuan pemeriksaan kali ini, Kejagung ingin mengetahui sejauh mana peran Johnny, sebagai pengawas dan pengguna anggaran terhadap proyek infrastruktur telekomunikasi tersebut.

Asal Uang Adek Plate Terungkap

Selain itu juga, untuk mengetahui peran Gregorius Alex Plate, adik Johnny G. Plate, dalam proyek BTS 4G Bakti Kominfo itu. Hal ini mengingat, Gregorius diketahui mendapatkan fasilitas dari Bakti Kominfo, seperti beberapa kali turut ke luar negeri.

Sebelumnya juga, Gregorius sudah mengembalikan uang fasilitas sebesar Rp 534 juta ke Kejagung. Disampaikan Ketut, pengembalian itu dilakukan secara sukarela.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Dirdik Jampidsus) Kejaksanaan Agung, Kuntadi, mengungkapkan aliran dana tersebut berasal dari anggaran Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

"Tentunya nanti kita lihat setelah kita ekspos, setelah kita gelar perkara,

tapi yang jelas itu dana dari Bakti," ujar Kuntadi di Kejagung, Rabu (15/3/2023). "Apakah itu terkait dengan proyek (BTS 4G-red) ini atau tidak, yang kami tahu itu diambil dari anggaran Bakti," sambungnya.

Kejaksanaan Agung berencana memeriksa kembali adik Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, Gregorius Alex Plate, dalam waktu dekat.

"Nanti, itu sudah masuk materi. Terkait dengan materi tentu saja tidak bisa disampaikan tapi bahwa ada fakta telah diterima dan hasil penggalangan dari penyidik akhirnya uang itu secara sukarela diserahkan, itu menjadi sebuah fakta yang bisa disampaikan. Tapi, apa dan bagaimana itu nanti materi di gelar perkara," pungkasnya. (wid,rla,ist/dya)

LIMA TERSANGKA KORUPSI BTS

1. Dirut Bakti Kominfo AAL
2. GMS selaku Direktur Utama Moratelindo
3. YS selaku Tenaga Ahli Human Development (Hudev) Universitas Indonesia Tahun 2020
4. MA selaku Account Director of Integrated Account Departement PT Huawei Tech Investment
5. IH selaku Komisaris PT Solitech Media Sinergy

KRONOLOGI BERDIRINYA BAKTI

2006 LAHIRNYA BTIP

Sebagai Balai yang menerapkan Badan Layanan Umum dibawah Kementerian Kominfo berdasarkan Peraturan Menteri Kominfo No. 35/PER/ M.Kominfo/11/2016

2008 MENJADI BP3TI

Tahap I
Menjadi BP3TI berdasarkan Peraturan Menteri Kominfo No 18/PER/M/ KOMINFO/11/2010.

Tahap II
BP3TI menjadi UPT Non eselon berdasarkan Peraturan Menteri Kominfo No 10 Tahun 2013

2017

Perubahan Organisasi dan Tata Kerja BP3TI berdasarkan Peraturan Menteri Kominfo No. 2 tahun 2017.

2018 MENJADI BAKTI

Berdasarkan Peraturan Menteri Kominfo No. 3 Tahun 2018.

Tujuan Perubahan Menjadi BAKTI:
1. Adaptasi berbagai kebutuhan sektor telematika.
2. Memenuhi tuntutan percepatan layanan.
3. Perbaikan tata kelola & Good Governance.
4. Peningkatan profesionalisme.

DPR Sepakat KPU Buat Aturan Capres Wajib Buka-bukaan Soal Pajak



Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia

JAKARTA - Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung sepakat jika Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuat aturan agar calon presiden (capres) buka-bukaan ke publik soal kepatuhan pembayaran pajak.

Doli mengatakan, dia tak akan masalah jika KPU nantinya persyaratan keterbukaan pajak untuk capres yang ingin mendaftar jadi peserta Pilpres 2024. Aturan itu

sendiri nantinya akan dimuat dalam Peraturan KPU (PKPU).

"[Jika] nanti ke m u d i a n dimasukkan dalam s a t u s y a r a t [k e w a j i b a n keterbukaan pembayaran pajak capres] ya saya kira enggak ada masalah. Nanti kita lihat PKPU. Kan KPU tuh yang buat kriteria-kriteria itu," jelas Doli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta P u s a t , R a b u

(15/3/2023).

Dia mengatakan bagaimana pun, bayar pajak merupakan suatu kewajiban bagi warga negara. Apalagi, lanjutnya, para calon pemimpin dan wakil rakyat. "Ya itu kan kewajiban. Bayar pajak itu kan wajib," ujar legislator dari Partai Golkar itu.

Meski begitu, Doli mengatakan selama ini pejabat publik juga wajib

mengisi LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara). Dia pun merasa, jika para pejabat publik tak bayar pasti akan ketahuan.

"Kalau enggak dimasukkan dalam syarat, kalau kita enggak bayar, pajak pasti diteriakin, diumumkan ke mana-mana," ungkap Doli.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memang sudah mendorong agar capres, calon wakil presiden (cawapres), dan calon legislatif (caleg) di Pemilu 2024 buka-bukaan terkait pembayaran pajak.

Bahkan, lanjutnya, KPU sebagai penyelenggara pemilu dapat bekerja sama dengan Ditjen Pajak Kementerian Keuangan untuk memastikan kepatuhan pembayaran pajak para peserta Pemilu 2024.

"Pemerintah tentunya mengimbau calon bagi kepala daerah nasional dan legislatif patuh terhadap kewajiban pajak. Nantinya bisa dibuat transparan, nanti Ditjen Pajak Kemenkeu bisa sampaikan siapa yang sudah melapor, siapa yang belum sehingga bisa memacu gelombang pembayaran pajak. Karena

Pemerintah punya etiket agar kepatuhan pajak berjalan seefektif mungkin," ujar Tito di St. Regis Hotel, Jakarta Selatan, Senin (13/3/2023).

K P U s e n d i r i m e m a n g mensyaratkan kepatuhan bayar pajak bagi capres dan cawapres di Pilpres 2024. Meski begitu, aturan itu hanya memerintahkan bakal capres dan cawapres yang mendaftar diri ke KPU untuk menyertakan bukti pembayaran pajak lima tahunnya terakhir. Meski begitu, tak ada kewajiban pembukaan pembayaran pajak mereka ke publik.

Komisioner KPU Idham Holik mengatakan aturan wajib pajak capres-cawapres sudah diatur dalam UU No. 7/2017 (UU Pemilu), tepatnya dalam Pasal 227 huruf g.

Aturan teknis pencalonan capres-cawapres juga memperjelas persyaratan wajib pajak itu, yaitu dalam Pasal 9 ayat (1) huruf m Peraturan KPU (PKPU) No. 22/2018.

"Pasal 227 huruf g UUD 7/2017 junto Pasal 9 ayat (1) huruf m PKPU 22/2018," jelas Idham saat dihubungi Bisnis, dikutip Minggu (12/3/2023). (wid,rls,ist/dya)

Semua Fraksi DPRD Kabupaten Malang Sepakati Adanya 3 Perubahan Perda dan 1 Pencabutan Perda

MALANG- Melalui rapat paripurna dengan agenda penyampaian Pandangan Umum (PU) fraksi, semua fraksi DPRD Kabupaten Malang, menyatakan telah sepakat terhadap 4 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang berasal dari Bupati Malang, Sanusi.

Adapun 4 Raperda tersebut yakni, perubahan atas Peraturan Daerah (Perda) No. 10 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perparkiran, kemudian perubahan Perda No. 3 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi, dan perubahan Perda No. 5 Tahun 2015 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan dan Kawasan Permukiman. Serta satu pencabutan Perda No. 1 Tahun 2018 tentang Bangunan Gedung.

"Terkait dengan Perubahan Perda Penyelenggaraan Perparkiran, seluruh fraksi menyatakan sepakat. Namun yang perlu diperhatikan yakni satu, nominal pajak parkir, maupun retribusi parkir saat ini harus disinkronkan dengan Raperda tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang saat ini masih dalam tahap pembahasan," ujar Juru Bicara Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Malang, Joko Eko Sujarwanto, dalam penyampaian pada rapat paripurna PU Fraksi atas 4 Raperda, Rabu (15/3/2023).

Sedangkan untuk Raperda atas perubahan Perda kedua, yakni Perda No. 3 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi. Seluruh fraksi yang terdiri atas PDIP, PKB, Golkar, Gerindra, dan Nasdem, juga menyatakan persetujuannya. Namun, mewakili seluruh fraksi, Joko berharap agar para investor dapat diberikan kemudahan dalam melakukan penanaman modal di Kabupaten Malang.

"Bahwa penanaman modal ini mempunyai peranan penting untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah. Antara lain seperti meningkatkan pendapatan masyarakat, menyerap tenaga kerja lokal, dan meningkatkan pelayanan publik, hingga mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah. Kami sepakat dengan hal tersebut," jelasnya.

Masih penjelasan Joko, ia juga menyebutkan bahwa untuk perubahan Perda No. 5 Tahun 2015 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan dan Kawasan Permukiman. Pihaknya berharap agar Bupati Malang dapat menjelaskan maksud dari usulan yang menyatakan, pengembang perumahan dengan luas lahan 1000 meter persegi sampai dengan 5000 meter persegi, wajib diajukan oleh pengembang berbadan hukum.

Terpisah, Ketua DPRD Kabupaten

Malang, Darmadi menjelaskan, sebelum akhirnya disepakati oleh para fraksi, naskah Raperda tersebut telah digodok oleh Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) DPRD Kabupaten Malang, setelah melalui diajukan oleh Bupati Sanusi.

"Yang memutuskan nanti adalah tim Bapemperda dan Pansus yang kami bentuk. Kalau pencabutan Perda tidak terlalu substansi karena begitu Perda yang baru tentang Pembangunan Gedung itu disetujui. Otomatis yang lama akan dicabut dan dibentuk Perda yang baru. Tapi nanti ada yang tim koreksi adalah Pansus dan tim yang ditunjuk Bupati," ungkap Darmadi.

Selain itu, Darmadi juga sedikit menyinggung terkait perubahan Perda Penyelenggaraan Perparkiran. Menurutnya, ketersediaan lahan parkir menjadi salah satu permasalahan yang masih perlu dituntaskan hingga saat ini. Selain itu, pihaknya juga berharap agar dengan adanya Perda baru nantinya dapat lebih menyempurnakan regulasi sebelumnya, terlebih terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi parkir.

"Saat ini salah satu permasalahan



Suasana Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Malang dalam agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap 4 Raperda yang diusulkan oleh Bupati Malang

di Kabupaten Malang salah satunya adalah perparkiran, penyiapan lahan parkir dan sebagainya, kemudian ini juga berkaitan dengan meningkatkan pendapatan asli daerah dari retribusi parkir. Maka nanti akan diatur penyelenggaraan parkir ini yang sebaik baiknya," tukas Darmadi.

Terpisah, Bupati Malang, Sanusi mengatakan bahwa seluruh usulan yang disampaikan akan dibahas dan dijawab oleh tim Raperdanya. Sementara itu, disinggung terkait dengan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) pria yang akrab dengan sapaan Abah Sanusi ini menjelaskan, secepatnya akan menyerahkan dokumen PSU kepada pihak KPK. Sehingga masyarakat dapat segera menikmati fasilitas umum dari Pemkab Malang. (santi*/dya)

3 Kali Pemilihan Ulang, Anwar Usman Terpilih Jadi Ketua MK Lagi



DASAR MK MENGGELAR RAPAT PLENO HAKIM PEMILIHAN KETUA DAN WAKIL KETUA MK

- Pemilihan ini merupakan amanat Pasal 4 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 tentang MK terkait masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua MK, serta menindaklanjuti Putusan MK Nomor 96/PUU-XVIII/2020.
- Pasal 4 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 tentang MK mengatur masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua MK selama 5 tahun dari sebelumnya hanya 2,5 tahun.
- UU MK kemudian sempat mengatur bahwa masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua MK saat beleid itu terbit, dalam hal ini Anwar Usman dan Aswanto, diperpanjang hingga mereka pensiun.
- Ketentuan Pasal 87 huruf a UU MK itu lah yang menyebabkan Anwar, yang menjabat Ketua MK sejak 2018 dan seharusnya lengser 2020 lalu, bisa menjabat hingga sekarang.
- Akan tetapi, melalui Putusan MK Nomor 96/PUU-XVIII/2020 tanggal 20 Juni 2022 membatalkan pasal itu, serta memerintahkan pemilihan Ketua dan Wakil Ketua MK 9 bulan setelah putusan itu dibacakan.

JAKARTA- Sembilan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) telah selesai menggelar rapat pleno khusus dengan agenda pemilihan Ketua dan Wakil Ketua MK periode 2023-2028 pada Rabu (15/3/2023).

Berdasarkan Peraturan MK nomor 6 tahun 2023 tentang Tata Cara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua MK, pemilihan dilakukan dengan voting terbuka yang diikuti oleh Hakim Konstitusi dalam rapat pleno terbuka.

Ketua MK Anwar Usman mengatakan 9 hakim MK mempunyai hak yang sama untuk dipilih maupun memilih. Baik sebagai ketua maupun sebagai wakil ketua. Setelah tiga kali dilakukan pemilihan ulang Ketua MK, Anwar Usman dinyatakan terpilih sebagai Ketua MK periode 2023-2028. Ia mengalahkan pesaing terdekatnya Arief Hidayat.

Dalam hasil voting pukul 15.39 WIB, Anwar meraih 5 suara. Sedangkan Arief Hidayat meraih 4 suara. "Para yang mulia hadirin yang saya muliakan, berdasarkan perolehan suara tersebut, maka Hakim MK Anwar Usman terpilih sebagai Ketua MK masa jabatan 2023-2028," kata Anwar Usman.

"Para hakim anggota rapat hadirin, yang juga saya muliakan,

kita telah melaksanakan pemilihan Ketua MK masa jabatan 2023-2028, pemilihan ketua merupakan kegiatan rutin yang kita lakukan," kata Anwar.

"Dengan sudah terpilihnya Ketua dan Wakil Ketua MK masa jabatan 2023-2028, maka selesai sudah agenda rapat pleno hakim hari ini," ucap Anwar.

Jalannya pemilihan cukup ketat. Hasil voting pukul 15.00 WIB, Anwar Usman dan Arief Hidayat memperoleh suara sama yakni 4. Sedangkan 1 suara dinyatakan tidak sah. Pemilihan ketua dilanjutkan ke putaran kedua.

Kemudian dalam putaran kedua, Anwar dan Arief lagi-lagi memperoleh jumlah suara yang sama. Pemilihan ketua MK putaran kedua hanya diikuti Anwar Usman dan Arief Hidayat. Hasil voting pukul 15.20 WIB, Anwar dan Arief lagi-lagi memperoleh 4 suara. 1 suara dinyatakan tidak sah.



Anwar Usman terpilih kembali menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi dua periode masa jabatan 2023 - 2028.

Oleh sebab itu, pemilihan Ketua MK dilanjutkan ke putaran ketiga. "Hadirin yang saya hormati, berdasarkan perolehan suara tersebut, hakim MK Anwar Usman memperoleh 4 suara dan Arief Hidayat juga memperoleh suara 4, bahwa oleh karena dalam putaran kedua tidak ada calon yang memperoleh suara lebih dari setengah hakim yang hadir, maka dilakukan pemungutan suara ketiga," kata Anwar.

Sementara pemilihan Wakil Ketua MK, Hakim Saldi Isra dinyatakan terpilih dalam voting. Dalam voting, Saldi memperoleh 5 suara. Ia bersaing dengan Daniel Yusmic Pancastaki Foeikh yang meraih 3 suara. Kemudian ada 1 suara abstain. (wid,rls,ant/dya)

Hingga 30 April, Pemkot Surabaya Bebaskan Sanksi Denda PBB dan Pajak Daerah



Program pembebasan sanksi denda PBB dan Pajak Daerah berlangsung mulai dari awal Maret hingga 30 April 2023. (Dok.humas)

SURABAYA- Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memberikan pembebasan sanksi denda administratif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta pajak daerah kepada masyarakat. Pembebasan sanksi denda administratif PBB dan pajak daerah menjelang peringatan Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) ke-730

dan rekreasi hiburan umum (RHU), reklame, hingga Pajak Penerangan Jalan umum (PPJ) di Kota Pahlawan.

"Bagi yang mempunyai kewajiban pembayaran PBB mulai dari tahun 1994-2022 dan wajib pajak daerah tahun 2011-2023, diharapkan segera membayar. Dendanya kita kurangi,

ini, juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat soal pentingnya membayar pajak.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surabaya, Hidayat Syah mengatakan, pembebasan sanksi denda PBB dan pajak daerah ini berlaku pada bangunan rumah, restoran, hotel,

kita nol-kan, tetapi pembayaran pokoknya tetap harus dibayar," kata Hidayat Syah, Selasa (14/3/2023).

Hidayat menjelaskan, pembebasan sanksi denda diatur dalam Peraturan Wali Kota (Perwali) No. 24 tahun 2023 tentang Penghapusan Sanksi Administratif, terhadap bunga dan denda pajak daerah kepada masyarakat dalam rangka HJKS ke 730. Selain itu, juga diatur dalam Perwali No. 17 tahun 2023 tentang penghapusan sanksi administratif, berupa denda dan bunga PBB kepada masyarakat, dalam rangka HJKS ke 730.

Dalam proses pembayaran PBB dan pajak daerah ini, masyarakat dapat melakukannya melalui aplikasi marketplace yang telah tersedia. Seperti Tokopedia, mobile banking Bank Jatim, Bank Mandiri, minimarket dan sebagainya.

"Selain itu, bisa juga melakukan pembayaran di kantor cabang Bapenda di Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) I hingga V. Kemudian di

Mal Pelayanan Publik Siola juga bisa," jelasnya.

Hidayat menyampaikan kepada seluruh masyarakat Surabaya untuk bisa segera membayar pajak dan memanfaatkan program pembebasan sanksi denda PBB dan pajak bangunan ini. Program tersebut berlangsung mulai dari awal Maret hingga 30 April 2023.

"Tahun 2022 lalu kan program ini dilaksanakan pada bulan April. Nah, karena Pak Wali (Eri Cahyadi) melihat antusiasme warga Surabaya banyak yang ingin membayar pajak, maka diajukan di Maret 2023," sampainya.

Maka dari itu, Hidayat mengimbau kepada masyarakat yang ingin membayar PBB dan pajak daerah diharapkan bisa segera menyelesaikan pembayaran. "Kami imbau kepada seluruh masyarakat, ayo manfaatkan program ini. Karena bayar pajak itu ke depannya juga kembali lagi untuk kepentingan warga Kota Surabaya," pungkasnya. (mira,rls/dya)

KPU Ungkap 3 Langkah Hukum Lawan Partai Prima



Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia dan Ketua KPU Hasyim Asy'ari (kanan) berbincang sebelum mulainya rapat dengar pendapat. (Dok)

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak akan melakukan negosiasi dengan Partai Prima terkait putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) soal penundaan Pemilu 2024. Dalam pemaparannya Ketua KPU Hasyim Asy'ari menyebut pihaknya sudah mengambil 3 langkah hukum untuk melawan Partai Prima.

"Pada situasi sekarang ini, kami berhadapan dengan Partai Prima itu tiga jalur (hukum). Jalur pertama adalah terhadap putusan PTUN yang perkara 468, mereka mengajukan memori PK ke MA sehingga KPU menyikapi dengan mengajukan kontra memori PK," kata Hasyim dalam Raker bersama Komisi II DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (15/3/2023).

Hasyim menyebut KPU juga mengajukan banding terhadap putusan PN Jakpus perkara No.757/PDT.G/2022/PN.JKT.PUS. Memori banding tersebut disampaikan langsung ke pengadilan tinggi.

"Kedua terkait putusan PN Jakpus perkara No.757, kami mengajukan upaya hukum banding dan mengajukan memori banding ke Pengadilan Tinggi," ungkapnya.

Tak hanya itu, upaya ketiga yakni pihaknya turut menempuh jalur hukum ke Bawaslu perihal gugatan atau laporan dari Partai Prima.

"Prima menempuh jalur baru laporan ke Bawaslu tentang dugaan pelanggaran administrasi. Yang dijadikan dasar adalah putusan PN Jakpus," kata dia.

"Jadi, kami ini berhadapan dengan

Partai Prima sampai saat ini melalui tiga jalur tersebut," tukas Hasyim. Untuk diketahui, seluruh upaya hukum ketiganya itu masih berproses hingga kini.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Prima Agus Jabo Priyono memang nyatakan tak masalah jika tahapan pemilu jalan terus asal pihaknya diberi kesempatan kembali mencalonkan diri jadi peserta Pemilu 2024.

Sebagai informasi, Partai Prima merupakan pihak yang melayangkan gugatan perdata ke KPU di PN Jakpus dengan nomor register 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst. Partai Prima merasa dirugikan karena KPU melakukan kesalahan dalam proses verifikasi administrasi sehingga gagal jadi peserta Pemilu 2024.

Akibatnya, mereka meminta PN Jakpus menghukum KPU untuk tak melanjutkan sisa tahapan Pemilu 2024. Dalam amar putusannya pada Kamis (2/3/2023), PN Jakpus kemudian menerima gugatan Partai Prima.

Jabo menegaskan, penundaan pemilu bukan niat utama mereka. Partai Prima, lanjutnya, hanya ingin agar hak politik mereka dipulihkan sebab putusan Bawaslu nomor 002/PS.REG/BAWASLU/X/2022 tertanggal 4 November 2022 menyatakan ada kesalahan yang dilakukan KPU selama proses verifikasi administrasi calon peserta Pemilu 2024.

Dia ingin Partai Prima diberi kesempatan lagi untuk mencalonkan diri jadi peserta Pemilu 2024. Pada saat ini, menurutnya, penundaan dan pengulangan pemilu jadi cara yang tersisa.

Namun, jika nantinya diberi kesempatan kembali untuk daftar jadi peserta Pemilu 2024 meski penyelenggaraan pemilu tetap berjalan maka Partai Prima akan menerimanya.

"Enggak ada masalah, enggak ada masalah [Pemilu 2024 jalan terus asal Partai Prima diberi kesempatan kembali daftar jadi peserta]," ujar Jabo dalam diskusi Memaknai Konstitusi Dalam Sistem Peradilan Pemilu di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (8/3/2023).

Bawaslu Kembali Gelar Sidang

Bawaslu kembali menggelar sidang lanjutan laporan Partai Prima terhadap KPU sebagai tindak lanjut putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam sidang tersebut, Partai Prima menghadirkan dua saksi dan bukti tambahan.

Sidang digelar di Kantor Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Rabu (15/3/2023). Dalam sidang itu, saksi dari Partai Prima menilai KPU tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Hal itu lantaran, adanya anggota Partai Prima yang memiliki KTA, namun dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) oleh KPU.

"Data eksternal itu juga lucu menurut kami, masa anggota kami, struktur kami dan pernah diperiksa di sini juga, jelas-jelas anggota kami tidak pernah terlibat dengan partai lain ber-KTA, tapi status keanggotaannya TMS, ini kan ajaib gitu menurut kami," kata saksi Bin Bin Firman.

KPU kemudian mempertanyakan status pekerjaan anggota Partai Prima yang dinyatakan TMS tersebut. Sebab, berdasarkan aturan, ada sejumlah pekerjaan yang tidak diperbolehkan terdaftar sebagai anggota parpol.

"Data-data keanggotaan yang kemudian di soal diantaranya data eksternal, bisa saja kalau di

keanggotaan ada PNS, TNI, Polri," kata Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU RI Muhammad Afifuddin.

"Kalau di situasi yang tadi Anda persoalkan 'kenapa harus diganti harus nya kami perbaiki', emang daftar keanggotaannya Partai Prima tidak ada satupun anggotanya yang saya contohkan tadi?" sambung dia.

Saksi Bin Firman mengatakan anggota Partai Prima yang dinyatakan TMS tersebut merupakan seorang PNS. Namun, dia menegaskan anggota tersebut saat ini telah pensiun dari status Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Ada. Jadi kaya (seperti) misalnya Sekretaris di Kota Tidore di KTP-nya tertulis PNS tapi kan dia sudah pensiun, KTP kita kan seumur hidup, itu PNS tertulis di KTP. Tapi saya sudah konfirmasi, harusnya bisa kita bikinkan surat," ujarnya.

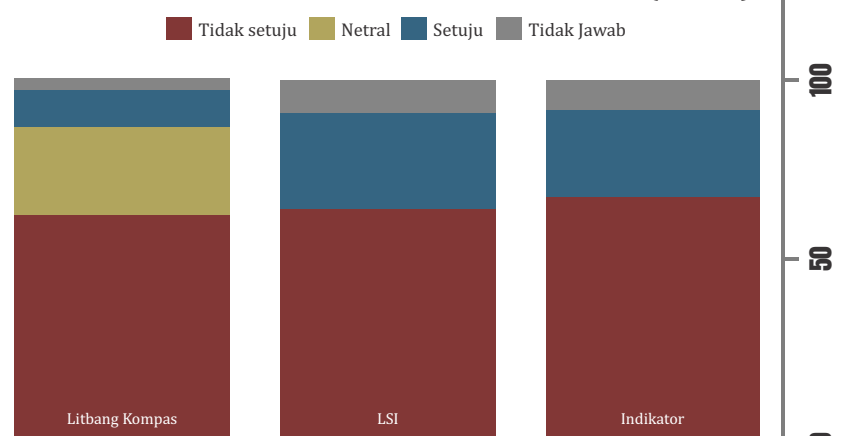
"Begitu juga di Ambon PNS juga di KTP nya padahal itu sudah pensiun, jadi tetap menurut kami seharusnya kembali ke MS dulu, agar bisa kami perbaiki," lanjutnya. Kemudian, Ketua Divisi Teknis KPU RI Idham Holik mengatakan akan mengecek laporan tersebut ke KPU Kabupaten/Kota. Dia menyebut hal itu untuk memastikan ada tidaknya kekeliruan saat verifikasi.

"Penting bagi kami untuk memastikan kerja verifikator kami ini benar, terutama verifikator administrasi di KPU Kabupaten/Kota, karena yang melakukan verifikasi administrasi keanggotaan adalah KPU Kabupaten/Kota. Tadi menyampaikan bahwa di Tidore dan Maluku bahwa yang bersangkutan sudah pensiun, tapi di TMS kan?" tanya Idham.

"Betul," jawab saksi Bin Firman.

"Jika berkenan mohon dicatat nanti kita cek, untuk memastikan apakah memang ada masalah atau tidak, Tidore dan Maluku Ambon ya," tutur Idham. (wid,rls,ist,ant/dya)

WACANA PENUNDAAN PEMILU HINGGA 2027 BERDASARKAN TIGA SURVEI (2022)



ANDANI AGNI PUTRI

Bangun Brand Fashion Nona





BRAND fesyen lokal, Nona, meluncurkan koleksi terbaru "Renjana Senja" yang merupakan koleksi hasil kolaborasi dengan aktor sekaligus desainer Indonesia, Tities Sapoeetra.

Koleksi ini merupakan koleksi eksklusif Nona yang terinspirasi dari keelokan senja. Renjana, sebagai simbol perasaan hati yang kuat, menjadi landasan Nona dan Tities untuk menciptakan koleksi ini dengan sepenuh hati.

"Saya sangat senang bisa berkolaborasi dengan Tities Sapoeetra. Perpaduan antara desain Nona yang fun dan vintage dipadu dengan ciri khas Tities yang modern memberikan warna baru untuk keseluruhan koleksi ini, sehingga koleksi ini bisa memberikan aura yang elegan serta klasik bagi pemakainya. Kami harapkan koleksi ini juga menjadi salah satu koleksi favorit untuk customer Indonesia dalam memilih busana lebaran tahun ini," kata founder Nona Andani Agni Putri.

Koleksi "Renjana Senja" terdiri dari kemeja, produk rajut, gaun lipit, detail renda yang cantik, hingga matching set untuk keluarga dengan desain monogram eksklusif Nona X Tities. Selain itu, pada koleksi ini, pertama kalinya Nona, mengeluarkan produk untuk anak-anak.

"Sama seperti matahari hari terbenam yang memanjakan mata dan membuat orang terkagum-kagum, Kami ingin menghadirkan koleksi yang membuat semua mata terpana saat menggunakan koleksi ini," jelas Andani.

Koleksi ini juga didominasi dengan tone warna hitam, cokelat, putih, kuning dan biru, yang memang identik dengan senja.

Ornamen-ornamen lace di setiap detail koleksi membuat tampilan menjadi lebih elegan dengan nuansa vintage yang klasik.

"Renjana ini sendiri berarti passion, yang juga mewakili passion aku dan Nona untuk menghasilkan sebuah karya di dunia fesyen. Kolaborasi dengan Nona ini menjadi

sebuah hal yang baru bagi aku, karena penggunaan bahan yang belum pernah aku gunakan sebelumnya," kata Tities Sapoeetra.

"Nona pun menjadi salah satu brand lokal yang sudah menarik perhatian aku, terutama Nona yang bisa dibilang sebagai pelopor brand fesyen lokal yang menggunakan bahan knit. Ini yang membuat aku sangat excited untuk berkolaborasi dengan Nona," tutupnya.

Pada peluncuran di Ashta District 8, koleksi Renjana Senja hadir dengan 30 tampilan, yang cocok digunakan untuk acara formal, santai dan bahkan untuk bersilaturahmi di Hari Raya nanti.

Koleksi eksklusif ini sudah bisa didapatkan di situs resmi Nona dan seluruh official marketplace Nona serta gerai offline dengan harga mulai dari Rp349.000 hingga Rp699.000.

Karier

Sebelum menjadi seorang pebisnis, ternyata Dani sempat menjadi seorang karyawan di salah satu perusahaan swasta di Indonesia. Kala itu, ia bekerja sebagai seorang Teknik Insinyur di perusahaan oil and gas.

Dani bertanggung jawab untuk mendesain mesin-mesin yang nantinya dipakai oleh perusahaan. Dari kecintaannya terhadap desain dan fashion, akhirnya ia pun memutuskan resign dan bergabung ke sekolah mode untuk mempelajari lebih dalam tentang fashion.

"Saya itu sebelum di dunia fashion, awalnya bekerja sebagai Teknik Insinyur di oil and gas. Lalu resign dan ikut sekmud (sekolah mode) fashion. Saya dari dulu memang suka desain mesin, jadi untuk desain pakaian bukan hal yang sulit because I always love fashion," terangnya.

Dengan niat baik tersebut, akhirnya Dani pun masuk ke industri fashion dengan menciptakan sebuah brand bernama Nona. Brand miliknya berorientasi pada outfit bergaya loose, baik loose dress, loose jeans, dan

sebagainya.

Menariknya, ide loose fashion ini muncul ketika dirinya melihat kebanyakan pakaian hadir dengan gaya fit to body. Padahal, menurutnya, pakaian yang tertutup masih bisa dinikmati dengan gaya loose.

"Dulu sekolah lagi panas-panasnya dan aku melihat semua pakaian banyak yang fit to body. Sekarang mah banyak brand yang loose fashion. Dulu, waktu 2017, belum ada banyak. Makanya, saya masuk dengan Nona loose fashion, loose dress, pakaian yang loose. Karena biarpun tertutup untuk berhijab, kalau loose masih adem," ujarnya.

Membangun brand tentu bukan perihal mudah. Ada banyak kendala yang juga pasti dirasakan, baik oleh Dani ataupun brand founder lain. Salah satunya adalah merasa sendirian dan gak tahu harus melakukan apa saat ingin melakukan ekspansi.

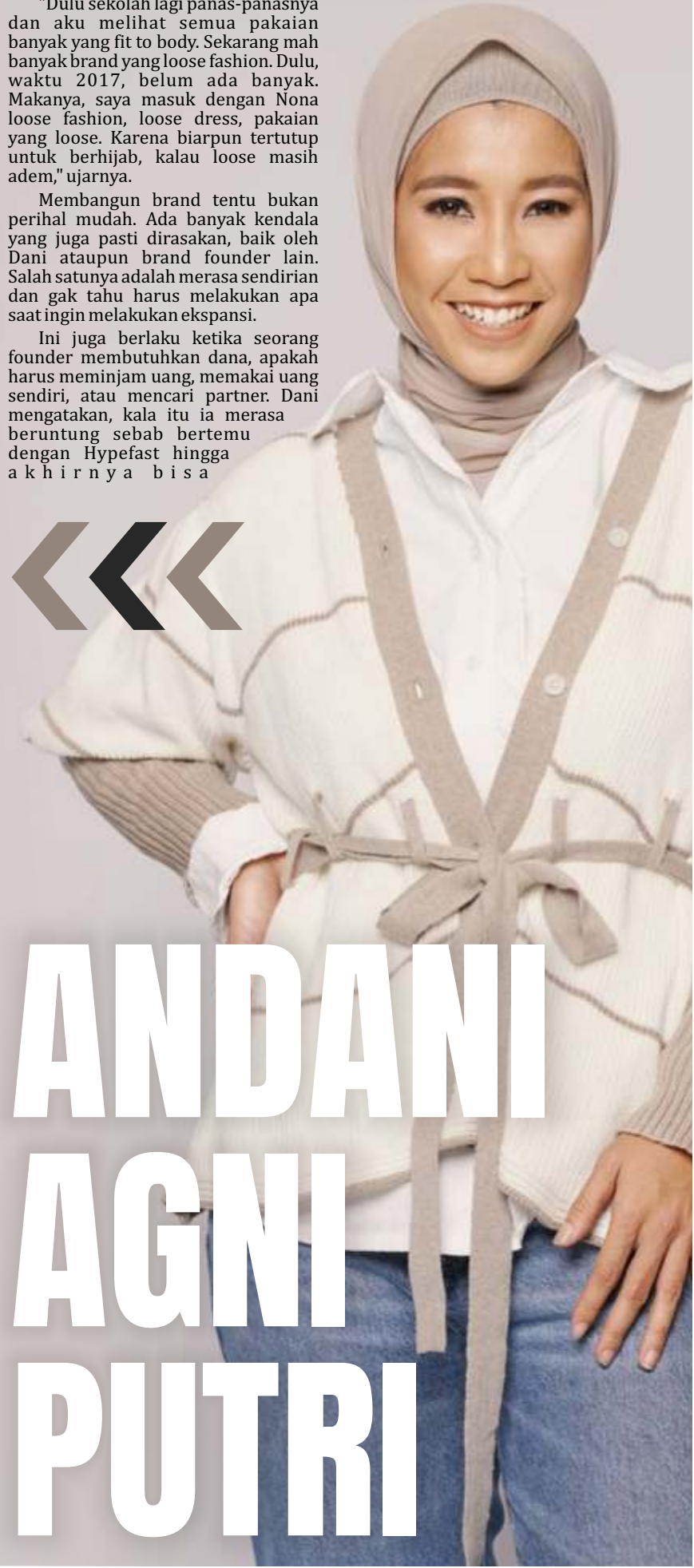
Ini juga berlaku ketika seorang founder membutuhkan dana, apakah harus meminjam uang, memakai uang sendiri, atau mencari partner. Dani mengatakan, kala itu ia merasa beruntung sebab bertemu dengan Hypefast hingga

bergabung.

Kini ia memilih Hypefast bukan hanya untuk investing money, tetapi juga dukungan dalam bidang lain (berbagai sumber)



ANDANI
AGNI
PUTRI



BENARKAH SERING MAKAN TELUR BIKIN KOLESTEROL TINGGI?

BANYAK orang beranggapan makan telur pasti bikin kolesterol tinggi. Padahal, faktanya makan telur juga bisa membantu menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah.

Selain menjadi sumber protein hewani, telur juga mengandung banyak nutrisi penting, seperti selenium, fosfor, kolin, kalsium, zinc, serta beragam vitamin, seperti vitamin A, B2, B5, B6, B12, D, E, dan K.

Bukan cuma itu, telur juga mengandung lemak. Nah, lemak inilah yang disebut bisa meningkatkan kadar kolesterol.

Peran kolesterol bagi tubuh

Sebelum mengaitkan antara makan telur dengan kolesterol tinggi, kamu perlu tahu dulu nih informasi tentang kolesterol.

Kolesterol adalah lemak darah yang diproduksi secara

alami oleh organ hati. Tubuh membutuhkan kolesterol untuk memproduksi berbagai hormon, vitamin D, dan beberapa zat untuk mencerna makanan.

Ada 3 jenis lemak darah, yaitu kolesterol baik atau HDL, kolesterol jahat atau LDL, dan trigliserida. Rentang kadar kolesterol yang dinilai masih dalam batas aman sangat tergantung pada usia. Berikut adalah penjelasannya:

Kaitan makan telur dengan kolesterol tinggi

Walaupun bisa diproduksi secara alami, kadar kolesterol juga dipengaruhi oleh jenis makanan yang dikonsumsi setiap hari.

Nah, salah satu makanan dengan kandungan kolesterol yang tinggi adalah telur. Di dalam satu kuning telur terkandung sekitar 186 mg kolesterol. Kadar ini dinilai cukup tinggi.

Selain itu, telur juga diketahui mengandung lemak. Kadar lemak dalam tiap butir telur bisa berbeda sesuai dengan jenisnya.

Seperti diketahui, lemak merupakan bahan baku pembuatan kolesterol. Nah, karena kandungan lemak dan kolesterol pada telur cukup tinggi, banyak orang beranggapan bahwa sering makan telur bisa

menyebabkan kolesterol naik. Sebetulnya, anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar, tapi tidak salah juga, ya.

Jawaban tersebut bisa jadi benar, jika Anda mengonsumsi lebih dari 2 butir telur dalam sehari. Apalagi kalau kamu mengonsumsi bagian kuning telur atau jika kamu menambahkan mentega atau minyak goreng dalam pengolahannya.

Namun, jika hanya mengonsumsi 1 butir telur perhari atau 7 butir telur per minggu, tidak akan terjadi peningkatan kadar kolesterol.

Sebaliknya, konsumsi dalam jumlah yang wajar disebut bisa menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah, lho. Belum lagi jika Anda hanya mengonsumsi bagian putih telur saja.

Selain itu, saat mengonsumsi telur, perhatikan juga jenis makanan lain yang kamu konsumsi.

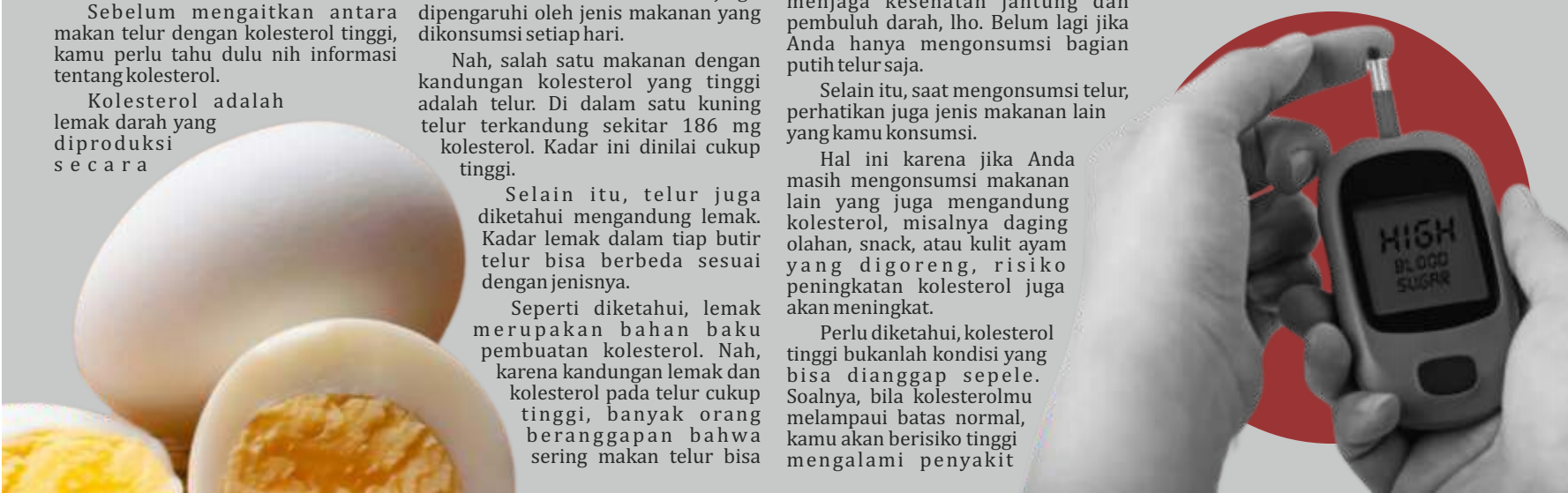
Hal ini karena jika Anda masih mengonsumsi makanan lain yang juga mengandung kolesterol, misalnya daging olahan, snack, atau kulit ayam yang digoreng, risiko peningkatan kolesterol juga akan meningkat.

Perlu diketahui, kolesterol tinggi bukanlah kondisi yang bisa dianggap sepele. Soalnya, bila kolesterolmu melampaui batas normal, kamu akan berisiko tinggi mengalami penyakit

jantung dan stroke.

Jadi, sudah jelas bahwa sering makan telur bisa saja membuat kolesterol naik, tapi bisa juga tidak. Semua sangat tergantung pada jumlah telur yang dikonsumsi setiap hari, bagian telur yang dimakan, juga kondisi kesehatan tubuh.

Jika masih khawatir untuk makan telur, apalagi bila memiliki penyakit tertentu, misalnya diabetes atau justru penyakit kolesterol tinggi, sebaiknya berkonsultasi ke dokter terlebih dahulu untuk mendapatkan anjuran makanan yang aman dikonsumsi setiap hari (alodokter)



META HENTIKAN KOLEKSI DIGITAL NFT

META Platforms Inc menghentikan dukungan untuk barang koleksi digital atau token yang tidak dapat dipertukarkan (NFT) di platformnya kurang dari setahun setelah diluncurkan, seiring dengan peningkatan pasar kripto.

"Kami menghentikan koleksi digital (NFT) untuk saat ini untuk fokus pada cara lain untuk mendukung kreator, orang, dan bisnis," kepala teknologi finansial (tekfin) perusahaan media sosial itu, Stephane Kasriel, men-tweet pada Senin (13/3), seperti dikutip Reuters.

Perusahaan meluncurkan dukungan bagi pembuat untuk berbagi NFT di Instagram dan Facebook tahun lalu, ketika aset kripto spekulatif meledak popularitasnya, dengan penjualan kartun kera hingga klip video menyentuh miliaran dolar.

Tetapi bitcoin dan token lainnya terpuak pada akhir 2022 setelah bursa utama FTX tiba-tiba mengalami kebangkrutan.

Kejatuhan itu diperparah dengan runtuhnya tiga bank Amerika Serikat minggu lalu, dua di antaranya berfokus pada kripto.

"Kami akan terus berinvestasi dalam alat tekfin yang dibutuhkan orang dan bisnis di masa mendatang. Kami merampingkan pembayaran dengan MetaPay, mempermudah pembayaran, serta berinvestasi dalam pembayaran perpesanan di seluruh Meta," kata Kasriel.

Layanan baru AI

Sebelumnya, Meta mengumumkan bahwa konglomerat teknologi tersebut ingin menambahkan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) ke dalam layanannya saat ini seperti Whatsapp, Instagram, dan Messenger pada tahun ini.

CEO Meta Platform dan pendiri Facebook Mark Zuckerberg

mengumumkan di media sosial bahwa perusahaan membuat grup produk tingkat atas baru di Meta yang berfokus pada AI generatif untuk meningkatkan pekerjaan mereka di industri tersebut.

Dalam pernyataannya, Meta mengatakan bahwa dalam jangka panjang, perusahaan terlihat fokus pada pengembangan "AI persona" yang dapat membantu orang dalam berbagai cara.

Pernyataan tersebut juga mengungkapkan bahwa AI dapat diintegrasikan ke dalam portofolio produk perusahaan saat ini seperti Whatsapp, Messenger, dan Instagram.

"Kami mengeksplorasi pengalaman dengan teks (seperti obrolan di WhatsApp dan Messenger), dengan gambar (seperti filter Instagram kreatif dan format iklan), dan dengan pengalaman video dan multi-modal," kata Mark dalam pernyataannya.

Selain itu, laporan Bloomberg mencatat bahwa tim AI di Meta akan dipimpin oleh Ahmad Al-Dahle, yang merupakan eksekutif pembelajaran mesin dan kecerdasan buatan.

Dia melapor langsung ke Meta Chief Product Officer Chris Cox, yang menurut laporan tersebut merupakan tanda signifikan bahwa perusahaan bermaksud untuk lebih mengintegrasikan AI ke dalam berbagai produk dan layanan online.

Namun, Meta menegaskan kembali bahwa perusahaan masih dalam tahap pertumbuhan AI, karena menyatakan bahwa perusahaan memiliki banyak pekerjaan dasar yang harus dilakukan sebelum mencapai pengalaman yang benar-benar futuristik.

Sebagai catatan penutup dari pengumuman tersebut, Mark Zuckerberg berkomentar bahwa dia bersemangat dengan semua hal baru yang akan dibangun Meta. Demikian diakhiri Gizmochina, Minggu (5/3) waktu setempat (Ant)





HIJAB <<<<< PRINTING & PASHMINA

Bakal Meriahkan Ramadan 2023

BUKAN rahasia lagi, kalau Indonesia sudah jadi kiblat fashion muslim sejak beberapa tahun lalu. Inovasi, garis desain, dan style desainer Indonesia kerap menjadi pemerhati fashion di negara Muslim lainnya.

Ada beberapa trend hijab baru yang akan bermunculan di tahun 2023. Mulai dari model lama seperti hijab segi empat, hingga bermunculan tren hijab yang lebih praktis dan tidak ribet untuk mengutamakan mobilitas kerja sehari-hari.

Tren fashion hijab saat Ramadan hingga lebaran 2023 lebih condong ke gaya kasual. Mengingat, setelah melewati masa pandemi, semua orang bakal memiliki banyak kegiatan di luar rumah.

Begitupun gaya pakaian perempuan berhijab, yang bakal mengusung kenyamanan dan simpel. Menurut fashion designer hijab Fenny Saptalia, cukup memadukan pakaian yang nyaman.

Irma Maryam, co-owner brand fesyen hijab Monel, memprediksi bahwa Ramadan 2023 akan diwarnai dengan hijab printing berbahan voal serta hijab model pashmina.

"Kalau yang saya rasakan dan saya lihat, trennya masih di voal, printing. Lalu sekarang masuk lagi ke tren pashmina," kata Irma saat ditemui di Jakarta beberapa waktu lalu.

Menurut Irma, tren hijab voal printing pada Ramadan 2023 tampaknya akan dilengkapi dengan motif yang sederhana seperti monogram atau lambang identitas sebuah brand, dengan warna-warna dasar dan monokrom.

"Sekarang kan setiap brand bebas boleh produksi baju dengan print desain sendiri, enggak terpaku dengan kesediaan material yang ada di pasaran. Jadi kita bebas nge-print apapun dan kebanyakan brand saat ini termasuk Monel, produksinya dengan logo-logo kita sendiri, jadi simpel," ujar Irma.

Mengenai pashmina, Irma mengatakan akan lebih banyak hadir pashmina instan sehingga semakin memudahkan penggunaannya.

"Sekarang sudah se-simpel mungkin, yaitu ada pashmina instan yang lebih mudah dipakai. Sekarang instannya lebih instan lagi, mungkin suatu saat nanti bisa dipakai bolak-balik," katanya.

Selain itu, Irma juga mengatakan masyarakat juga tampaknya sudah senang untuk memadupadankan alias mix and match pakaian, sehingga bisa tampil dengan look yang berbeda dan lebih segar.

Menurut Irma, mix and match pakaian kini tak harus selalu dengan warna senada. Banyak masyarakat yang mulai berani tampil dengan "tabrak warna" dan "tabrak motif".

"Orang-orang sekarang sudah berani. Misalnya enggak harus krem terus dari atas sampai bawah, tapi mereka udah pada pintar untuk mix and match misalnya warna-warna soft dimainkan, bahkan dengan warna bold juga mereka berani," ujarnya.

"Kemudian kerudung printing dengan baju printing juga oke, asal tetap nyaman dilihat. Kalau motif dengan polos kan sudah biasa ya," kata Irma (Ant)



Harga Beras Liar (dari hal 1)

HARGA beras di pasar masih tinggi, padahal sebelumnya impor beras 500.000 ton sudah dilakukan. Selain itu, saat ini pasokan beras pun meningkat dengan adanya panen raya. Bahkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun sampai bingung, pasokan beras meningkat tapi harga beras masih tinggi.

"Kita lihat ini kan masih panen raya, logikanya panen raya itu supply-nya banyak mestinya harga turun. Ini kok nggak (turun harganya). Ini yang baru kita cari," ungkap Jokowi di Istana Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (15/3/2023).

Di sisi lain, Jokowi merestui harga eceran tertinggi (HET) beras dan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah petani naik. Badan Pangan Nasional (Bapanas) sudah mengumumkan besarnya, meski aturannya kenaikan harga itu belum terbit.

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengungkapkan alasan kenaikan HET dan HPP yang dilakukan pemerintah. Menurutnya kenaikan dilakukan untuk menguntungkan semua pihak.

Misalnya, kenaikan HPP gabah kering panen (GKP) yang harganya dinaikkan menjadi Rp 5.000 per kilogram, hal itu dilakukan untuk memberikan keuntungan kepada para petani.

"Kita sudah punya kalkulasi cost structure-nya dan Presiden menyampaikan harus untung di tingkat petani harganya harus wajar di penggilingan dan pengusaha dan konsumen, sehingga angka Rp 5.000 ini sudah cukup," ujar Arief ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (15/3/2023).

Menurutnya angka ini memang tak 100% menyenangkan petani, namun setidaknya sudah ada kenaikan. "Angka ini sudah baik, dari Rp 4.200 ke Rp 5.000," sebutnya.

Kemudian dia menjelaskan meskipun HET beras mengalami penyesuaian, kenaikannya masih terjangkau bagi masyarakat. Pada intinya, menurut Arief yang ingin dilakukan adalah menguntungkan petani, produsen, distributor, dan juga konsumen.

"Kemudian untuk HET untuk batas di konsumen, sedangkan untuk HET ini kita bagi 3 zona tadi yang

disampaikan untuk konsumennya HET, dan melindungi petani HPP di Bulog," kata Arief.

Sebelumnya, Bapanas mengatakan pemerintah akan menaikkan harga eceran tertinggi atau HET beras berdasarkan beberapa zonasi di tanah air. Untuk zona 1 yang mencakup seluruh Pulau Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, NTB dan Sulawesi HET menjadi Rp 10.900 per kilogram untuk beras medium dan Rp 13.900 untuk beras premium.

Lalu untuk zona 2 mulai dari Pulau Sumatera selain Lampung dan Sumatera Selatan, NTT, dan Kalimantan, HET menjadi Rp 11.500 per kilogram untuk beras medium dan Rp 14.400 untuk beras premium.

Lalu, zona 3 yang mencakup Maluku dan Papua HET beras berada di Rp 11.800 per kilogram untuk beras medium dan Rp 14.800 untuk beras premium.

Sementara untuk penetapan HPP untuk gabah kering panen (GKP) di tingkat petani mencapai Rp 5.000 per kilogram, kemudian HPP GKP di tingkat penggilingan sebesar Rp 5.100 per kilogram, lalu gabah kering giling (GKG) di tingkat penggilingan sebesar Rp 6.200 per kilogram, dan terakhir GKG di Gudang Perum Bulog sebesar Rp 6.300 per kilogram.

Selanjutnya, ada juga HPP beras untuk gudang Perum Bulog menjadi Rp 9.950 per kilogram. Arief menjelaskan beras yang dimaksud memiliki derajat SOSO 95%, kadar air 14%, butir patah maksimum 20%, dan butir menir maksimum 2%.

Impor Lagi?

Kemungkinan impor lagi disampaikan Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan. "Ini kemarin dipimpin presiden, kapanpun diperlukan kita bisa masuk lagi 500 ribu ton. Karena stok Bulog harusnya 1,2 juta ton, sekarang kalau nggak salah tinggal 300-an (ribu ton)," katanya saat Raker dengan Komisi VI DPR RI, Rabu (15/3/2023).

Sayangnya Zulhas tidak menyebut kapan impor beras dilakukan, namun dia mengaku sebenarnya kurang setuju dengan opsi.

"Walaupun berat, saya ini sebenarnya nggak setuju impor-impor itu, tapi tidak ada pilihan. Kemarin diputuskan kembali 500 ribu

ton, tapi kapan (kalau) diperlukan. Karena sekarang lagi panen raya," lanjutnya.

Menurutnya, opsi tersebut muncul dipicu karena perang Rusia-Ukraina. Konflik tersebut menyebabkan sejumlah komoditas pangan menjadi langka.

"Tapi nanti (impornya), kalau diperlukan. Karena begini, jadi Rusia Ukraina itu komoditas jadi langka, jadi terbatas. Jadi kita harus beli dulu walaupun nanti kapan-kapan kalau kita butuh baru kita ambil. Jadi kita beli kita taro di tempat mereka," jelasnya.

Yang pasti opsi impor beras tidak dilakukan sekarang, karena Indonesia masih di periode panen raya. "Belum sekarang ini kan lagi panen raya, nggak mungkin. Tapi kalau kita nggak beli nanti nggak ada, gimana?," terangnya.

Terkait detail impor, menurut Zulhas, Kementerian Perdagangan hanya sebagai pelaksana impor. Sementara teknis lainnya ada di Kementerian Pertanian, Bapanas, dan Bulog.

"Memang kenaikan harga publik taunya Kemendag. Tapi prosedurnya pemutusannya itu ada di Bapanas, Kementan dan Bulog. Kita melaksanakan impor saja. Tetapi kalau harga naik ya tentu tugas kami menjelaskan dan tanggung jawab," ungkapnya.

Sebagai informasi, pemerintah sebelumnya memutuskan untuk mengimpor beras sebanyak 500 ribu ton pada Desember 2022. Beras impor masuk bertahap ke Indonesia hingga Februari 2023.

Terpisah, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengungkapkan pilihan impor beras masih akan dikaji selama 3 bulan ke depan. Menurutnya, ada beberapa hal yang jadi perhitungan.

Arief memaparkan sampai saat ini bila dilihat dari jumlah neraca pangan produksi dalam negeri sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan. Hal itu memperhatikan adanya panen raya yang terjadi di Indonesia.

"Pertama kalau dilihat mengenai neraca pangan itu, produksi dalam negeri, saat ini cukup buat apa impor," kata Arief di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.

Kemudian, dia menjelaskan bila nantinya produksi dalam negeri berkurang. Misalnya karena ada perubahan cuaca atau ada serangan

hama dan membuat neraca pangan menjadi timpang, maka bisa saja impor dilakukan. Tapi, Arief menegaskan pilihan impor adalah opsi paling terakhir yang diambil. Pihaknya, akan mencari opsi lainnya dulu untuk menyeimbangkan neraca pangan.

"Saat kita memang memerlukan itu (impor) kita bisa saja lakukan, tapi itu last option," sebut Arief.

Menurutnya, impor yang dilakukan sejak Desember 2022 pun sudah sangat cukup menahan kenaikan harga yang terjadi. Bila tidak ada impor, mungkin kenaikan harga beras akan lebih tinggi dari saat ini.

"Kenapa tahun kemarin, tahun lalu memutuskan 500.000 ton diimpor? Kalau hari ini tidak ada impor itu hari ini kita sulit sekali," pungkasnya.

Sementara Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Mukhammad Faisol Amir dalam keterangan tertulis mengatakan, pemerintah seharusnya menyelesaikan fokus utama tersebut untuk menekan harga beras. Namun demikian, pemerintah malah memilih mengeluarkan ketentuan fleksibilitas harga gabah yang berlaku 11 Maret 2023.

Menurut dia, fleksibilitas harga gabah belum tentu efektif dalam menstabilkan harga beras. Terlebih, harga gabah kering panen yang ditawarkan oleh pemerintah masih belum cukup kompetitif.

BPS mencatat, harga gabah kering panen di bulan februari lalu sebesar Rp 5.711 per kg. Sementara dengan fleksibilitas harga, gabah dihargai sebesar Rp 5.000,- di tingkat petani.

"Walaupun bermaksud memberikan jaminan harga, kebijakan ini justru tidak menarik bagi petani," ujarnya. Faisol mengatakan, kebijakan ini justru memicu adanya pasar gelap dan meningkatkan risiko kelangkaan beras. Di sisi lain pemerintah justru menyebut panjangnya rantai distribusi adalah penyebab tingginya harga beras di Indonesia.

"Kalau begitu pemerintah harus bisa menyederhanakan rantai distribusi yang panjang dulu sebelum menerapkan fleksibilitas," ujarnya.

Untuk di sisi hilir, pemerintah sudah seharusnya lebih responsif terhadap kemungkinan impor beras untuk memenuhi kebutuhan beras domestik dan juga untuk menahan tingginya harga di pasar. Saat ini pemerintah tidak bisa memenuhi jumlah seluruh permintaan beras dengan harga yang terjangkau. (wid,rls,ant,kum,mer/dya)

PERBANDINGAN HARGA SELAMA 6 BULAN TERAKHIR

KOMODITAS (RP)	1/8/2022	1/9/2022	3/10/2022	1/11/2022	1/12/2022	2/1/2023
I Beras	11.800	11.950	12.150	12.200	12.300	12.650
1. Beras Kualitas Bawah I (kg)	10.700	10.850	11.050	11.100	11.200	11.500
2. Beras Kualitas Bawah II (kg)	10.450	10.550	10.750	10.750	10.900	11.200
3. Beras Kualitas Medium I (kg)	11.800	11.950	12.150	12.200	12.350	12.650
4. Beras Kualitas Medium II (kg)	11.600	11.750	11.950	12.050	12.150	12.450
5. Beras Kualitas Super I (kg)	13.100	13.200	13.450	13.500	13.600	14.000
6. Beras Kualitas Super II (kg)	12.700	12.850	13.050	13.150	13.300	13.650

Episode Baru Dugaan Korupsi Bansos Ada 6 Orang Ditetapkan Tersangka, Termasuk Eks Dirut TransJakarta

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah menetapkan tersangka baru dalam kasus korupsi bantuan sosial atau bansos untuk keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) di Kementerian Sosial (Kemensos) pada 2020 sampai 2021. Perkara korupsi tersebut merupakan pengembangan dari kasus yang menjerat bekas Menteri Sosial Juliari Batubara.

Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Transjakarta, Kuncoro Wibowo dan lima tersangka kasus dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) beras di Kementerian Sosial (Kemensos) dicegah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar tidak bepergian keluar negeri.

Jurubicara Bidang Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri mengatakan, sebagai rangkaian dari proses dan kebutuhan penyidikan kasus dugaan korupsi dalam pekerjaan penyaluran bansos beras untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2020-2021 di Kemensos, KPK telah mengajukan tindakan cegah agar tidak melakukan perjalanan ke luar negeri kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

"Terhadap 6 orang yang diduga terkait dengan perkara ini. Saat ini adalah pengajuan cegah pertama selama 6 bulan ke depan sampai dengan Juli 2023 dan dapat diperpanjang kembali apabila diperlukan," ujar Ali, Rabu (15/3/2023).

Ali menjelaskan, pencegahan itu dilakukan agar para pihak terkait dapat hadir memenuhi panggilan tim penyidik sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

KPK pada hari ini secara resmi mengumumkan penyidikan perkara baru ini. Akan tetapi, KPK belum membeberkan identitas para tersangka dan konstruksi perkaranya. Hal itu akan diungkapkan ke publik setelah dilakukan upaya paksa penangkapan atau penahanan terhadap para tersangka.

Sumber menyebutkan, KPK telah menetapkan enam orang sebagai tersangka, yaitu Kuncoro Wibowo selaku Direktur Utama (Dirut) PT Bhandha Ghara Reksa (BGR) Logistic yang sebelumnya sempat menjabat sebagai Dirut PT Transjakarta sejak Januari-Maret 2023.

Selanjutnya ada Ivo Wongkaren selaku Ketua Tim Penasihat PT Primalayan Teknologi Persada (PTP); Budi Susanto selaku Direktur Komersial PT BGR; April Churniawan

selaku VP Operation PT BGR; Roni Ramdani selaku Ketua Tim Penasihat PT PTP; dan Richard Cahyanto selaku GM PT PTP

Kilas Balik Kasus

Kilas balik korupsi bansos di Kemensos Berdasarkan catatan, KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap pejabat Kemensos pada 4 hingga 5 Desember 2020. Penangkapan pejabat Kemensos itu diduga terkait korupsi bansos di Kemensos dalam penanganan pandemi Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek 2020. Kemudian pada Minggu dini hari, 6 Desember 2020, KPK menetapkan Menteri Sosial Juliari Batubara saat itu sebagai tersangka kasus.

Ketua KPK Firlil Bahuri saat itu mengatakan pejabat pembuat komitmen (PPK) pada Program Bansos di Kemensos diduga telah menerima hadiah dari para vendor Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah bansos di Kemensos dalam penanganan Pandemi Covid-19. KPK menetapkan empat tersangka dalam kasus ini, yaitu Juliari, Matheus Joko Santoso, Adi Wahyono, ketiganya adalah penerima, "Dan sebagai pemberi yaitu Ardian IM dan Harry Sidabuke," kata Firlil.

Menurut Firlil, pada pelaksanaan paket bansos sembako periode pertama, diduga PPK telah menerima fee Rp12 miliar yang pembagiannya diberikan secara tunai oleh Matheus kepada Juliari melalui Adi Wahyono

dengan nilai sekitar Rp 8,2 miliar. Pemberian uang tersebut, selanjutnya dikelola oleh Eko dan orang kepercayaan Juliari bernama Shelyv untuk digunakan membayar berbagai keperluan pribadi Juliari. Untuk periode kedua pelaksanaan paket bansos sembako, terkumpul fee dari Oktober 2020 sampai dengan Desember 2020 sejumlah sekitar Rp 8,8 miliar yang juga diduga akan digunakan untuk keperluan Juliari.

Dalam perkara tersebut, Juliari terbukti menerima uang suap terkait pengadaan bansos Covid-19 sekitar Rp 32,482 miliar. Juliari dijatuhi hukuman oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pidana penjara 12 tahun plus denda Rp 500 juta pada 23 Agustus 2021. Hakim juga mewajibkan Juliari membayar uang pengganti sejumlah Rp 14,5 miliar. Selain itu, hakim mencabut hak politik Juliari untuk dipilih dalam jabatan publik selama empat tahun setelah selesai menjalani pidana pokok.

KPK telah menyetorkan uang pengganti dari terpidana kasus korupsi bansos Covid-19, Juliari Batubara, sejumlah Rp 14,5 miliar ke kas negara. Mantan Menteri Sosial tersebut disebut telah lunas membayar uang pengganti seperti putusan pengadilan. Pelaksana Tugas (Plt.) Juru Bicara KPK Ali Fikri di Jakarta, Senin, 1 Agustus 2022 mengatakan Juliari melunasi uang pengganti sebesar Rp 14,5 miliar secara bertahap dengan tiga kali pembayaran.(wid,rlsist/dya)









Mantan Dirut Transjakarta M. Kuncoro Wibowo jadi tersangka kasus korupsi bantuan sosial (bansos) beras untuk Program Keluarga Harapan (PKH) di Kementerian Sosial (Kemensos). Mantan Direktur Utama PT Bhandha Ghara Reksa (BGR) itu dijerat bersama lima orang lainnya.

DELAPAN SAKSI YANG DIPERIKSA:

1. Mucthar Djmaluddin Supervisor Distribusi PT BGR Divre Kupang
2. Polikarpus Meo Teku Koordinator Wilayah 1 PKH Provinsi NTT
3. Hikmatussobri Koordinator Pendamping KPM PKH Kabupaten Serang 2020 sampai Maret 2021
4. Muhidin Koordinator Kabupaten Tangerang tahun 2020
5. Kristianus Karo Pendamping PKH
6. Erti Vertiana Selan Pendamping PKH
7. Nurul Falah Citra Pendamping PKH Kota Serang
8. Ida Roswita Hasan Pendamping PKH.

ENAM TERSANGKA KASUS DUGAAN KORUPSI BANSOS KEMENSOS:

- | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|  | KUNCORO WIBOWO |  | RICHARD CAHYANTO |
|  | IVO WONGKAREN |  | RONI RAMDANI |
|  | APRIL CHURNIAWAN |  | BUDI SUSANTO |